



Evaluasi keberhasilan strategi Dinas Kesehatan dalam upaya percepatan penurunan stunting

Agus Susanto, Dewi Laelatul Badriah, Mamlukah Mamlukah

Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bhakti Husada Indonesia

How to cite (APA)

Susanto, A., Badriah, D. L., & Mamlukah, M. (2025). Evaluasi keberhasilan strategi dinas kesehatan dalam upaya percepatan penurunan stunting. *Journal of Nursing Practice and Education*, 5(2), 268–276. <https://doi.org/10.34305/jnpe.v5i2.1721>

History

Received: 26 April 2025

Accepted: 28 Mei 2025

Published: 30 Juni 2025

Corresponding Author

Agus Susanto, Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bhakti Husada Indonesia; arenk_45@gmail.com



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRAK

Latar Belakang: Tingginya angka stunting dan peningkatan kasus anemia pada ibu hamil di Indonesia menunjukkan hubungan erat antara stunting dan masalah gizi, yang menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan ibu dan anak. Di Kabupaten Majalengka, prevalensi stunting mencapai 24,1%. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi strategi yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan untuk mempercepat penurunan stunting di wilayah tersebut pada tahun 2024.

Metode: Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan tujuh informan utama. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD), kemudian dianalisis melalui tiga tahap, yakni persiapan, pelaksanaan, dan analisis data.

Hasil: Menunjukkan bahwa strategi organisasi telah terjalin kerja sama dengan berbagai pihak, strategi program direncanakan secara sistematis dengan basis data dan anggaran yang jelas, serta dukungan sumber daya dari pemerintah dalam bentuk pendanaan program. Selain itu, kolaborasi lintas lembaga berjalan efektif untuk mempercepat penurunan stunting.

Kesimpulan: Strategi program yang paling berpengaruh adalah inovasi “kancil menari,” yang diharapkan dapat ditingkatkan melalui kerja sama lintas sektor agar hasilnya optimal dan diterima oleh masyarakat.

Kata Kunci : Stunting, anemia, strategi, percepatan, evaluasi

ABSTRACT

Background: The high prevalence of stunting and the increasing cases of anemia among pregnant women in Indonesia indicate a strong link between stunting and nutritional problems, posing a serious threat to the well-being of mothers and children. In Majalengka Regency, the prevalence of stunting reaches 24.1%. This study aims to evaluate the strategies implemented by the Health Office to accelerate the reduction of stunting in the region in 2024.

Method: This study used a qualitative approach with a case study design, involving seven key informants. Data were collected through in-depth interviews and Focus Group Discussions (FGD), then analyzed in three stages: preparation, implementation, and data analysis.

Result: The findings show that organizational strategies have established cooperation with various parties, program strategies are systematically planned based on clear data and budget, and resource support from the government is provided in the form of program funding. In addition, effective cross-institutional collaboration is ongoing to accelerate stunting reduction.

Conclusion: The most influential program strategy is the innovation “kancil menari,” which is expected to be enhanced through cross-sector collaboration to achieve optimal results and acceptance by the community.

Keyword : Stunting, anemia, strategy, acceleration, evaluation

Pendahuluan

Permasalahan stunting merupakan isu kesehatan yang sangat penting di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, yang membutuhkan intervensi cepat dan berkelanjutan (Firmansyah & Elina, 2024). Tingginya angka stunting serta peningkatan anemia pada ibu hamil di Indonesia menunjukkan hubungan erat antara stunting dan kekurangan gizi yang memberikan ancaman serius terhadap kesejahteraan masyarakat (Wagustina et al., 2024).

Berdasarkan data global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa prevalensi stunting di dunia masih tinggi, yakni sekitar 22% pada tahun 2020 dan meningkat sedikit menjadi 22,3% pada 2022 (Unicef Indonesia, 2024). Indonesia sendiri telah melakukan berbagai program sejak 2018 yang menurunkan prevalensi stunting dari 30,8% menjadi 21,6% pada 2022 meskipun angka ini masih di atas batas WHO (Kementerian Kesehatan, n.d.).

Di tingkat provinsi Jawa Barat mengalami prevalensi stunting sebesar 21,7% pada 2023 dan termasuk salah satu daerah dengan angka stunting yang melebihi batas standar WHO (Kementerian Kesehatan, 2022). Kabupaten Majalengka, khususnya, menempati peringkat ketujuh tertinggi di Jawa Barat dengan angka stunting mencapai 24,1% pada 2023. Faktor penyebab stunting sangat beragam, meliputi aspek ibu (seperti malnutrisi selama kehamilan), ayah (seperti kebiasaan merokok), anak (berat badan lahir rendah, asupan gizi buruk) dan lingkungan (kurangnya pengetahuan dan pola asuh yang kurang tepat) (Dwi Danti, 2022). Maka intervensi yang efektif memerlukan sinergi multisektor dan strategi yang komprehensif.

Sebagai respon terhadap masalah ini, pemerintah Indonesia berkomitmen melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 untuk mempercepat penurunan stunting, dengan target nasional sebesar 14% pada 2024. Strategi yang diterapkan mencakup perbaikan gizi, peningkatan kualitas pengasuhan, akses layanan kesehatan, dan sanitasi yang lebih baik

(Amalia Mulyani et al., 2024). Selain itu, penelitian sebelumnya menegaskan bahwa keberhasilan strategi program dan kelembagaan, termasuk kolaborasi lintas sektor serta inovasi seperti “kancil menari”, sangat penting dalam mempercepat penurunan stunting (Fatris, 2021). Khususnya daerah Kabupaten Majalengka, meskipun intervensi gizi sudah berjalan, masih diperlukan perencanaan strategis yang lebih efektif untuk menurunkan angka stunting secara signifikan (Kemenkes RI, 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Keberhasilan Strategi Pelayanan Kesehatan Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Majalengka Tahun 2024”.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan tujuh informan kunci. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta diskusi kelompok terfokus (FGD) dan proses analisis data dilaksanakan dalam tiga tahap: persiapan, pelaksanaan, dan analisis. Penelitian dilakukan selama 1 bulan pada tahun 2024

Hasil

Strategi merupakan rencana yang dirancang secara sengaja oleh para pemimpin organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam konteks Dinas Kesehatan, strategi dianalisis dari tiga perspektif utama: perumusan, implementasi, dan pengendalian strategis. Perumusan strategi melibatkan penyusunan rencana yang matang, implementasi berfokus pada penerapan rencana tersebut, sementara pengendalian strategis bertujuan menyesuaikan rencana agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan efektif.

Strategi organisasi sendiri mencakup pengembangan misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi yang terkait dengan tindakan-tindakan terarah guna mencapai sasaran jangka panjang. Pencegahan stunting, yang bersifat swadaya dan lintas sektor, menekankan tiga

pilar utama: pemberian nutrisi yang cukup, akses sanitasi yang memadai, dan perbaikan pola asuh, dengan target mencapai zero new stunting pada tahun 2030.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Puskesmas Majalengka dan Kepala Puskesmas Cikijing, strategi organisasi dalam menangani stunting melibatkan kerja sama dengan berbagai organisasi seperti Dharma Wanita Persatuan (DWP) di beberapa dinas, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kepala Puskesmas Majalengka menyatakan, "Organisasi; DWP Kabupaten, DWP DISDIK, DWP DISKOMINFO, DWP IDI," sementara Kepala Puskesmas Cikijing menambahkan, "PKK, IDI (untuk Cikijing belum ada data)." Kolaborasi lintas sektor juga dianggap penting, melibatkan instansi seperti Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan untuk mengatasi faktor risiko stunting yang tidak hanya terkait gizi, tetapi juga kondisi ekonomi, pendidikan, dan sanitasi lingkungan. Dengan demikian, strategi organisasi yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka mengedepankan kerja sama lintas sektor dan lembaga sebagai kunci percepatan penurunan stunting.

Strategi program percepatan penurunan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka berfokus pada keterlibatan program secara terencana dan terarah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Kerja Kesga Gizi, langkah awal yang dilakukan meliputi pemetaan permasalahan, analisis situasi, dan evaluasi untuk menentukan intervensi spesifik maupun sensitif. Beliau menyatakan, "Pemetaan permasalahan, analisis situasi dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui intervensi spesifik dan sensitif yang dapat dilakukan untuk percepatan dan pencegahan stunting." Basis yang digunakan mencakup data hasil penimbangan balita di posyandu, skrining anemia remaja putri, data konsumsi tablet tambah darah (TTD) oleh remaja putri dan ibu hamil, data MP-ASI, ASI eksklusif, imunisasi, serta ketersediaan logistik seperti antropometri kit dan alat USG. Selain itu, ketersediaan SDM kesehatan terlatih serta dukungan anggaran untuk PMT, PKMK, dan

iuran premi PBI menjadi komponen penting dalam pelaksanaan program.

Namun, pelaksanaan program tidak lepas dari hambatan. Ketua Tim Kerja Kesga Gizi menyebutkan beberapa kendala seperti terbatasnya anggaran, perubahan perilaku masyarakat yang belum maksimal terutama terkait pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta konvergensi antarprogram yang belum maksimal. Hambatan-hambatan ini menjadi tantangan tersendiri karena memengaruhi efektivitas program, baik dari sisi manajemen maupun implementasi di lapangan. Meski demikian, berdasarkan hasil survei SSGI dan SKI, Kabupaten Majalengka menunjukkan adanya tren penurunan kasus stunting setelah intervensi: dari 23% (SSGI 2021) menjadi 24,3% (SSGI 2022), 24,1% (SKI 2023), dan target Renja 2024 sebesar 17,36%.

Menurut Kepala dan Pengelola Gizi Puskesmas Majalengka, strategi program yang diterapkan mencakup sosialisasi stunting, pelatihan kader, pendataan sasaran, pengukuran status gizi, verifikasi dan validasi data, audit stunting, pemberian PMT, serta monitoring dan evaluasi. Mereka menekankan pentingnya edukasi kepada remaja putri terkait konsumsi TTD sebagai bagian dari golden age pencegahan, edukasi ibu hamil melalui kelas ibu, hingga penyuluhan mengenai ASI eksklusif dan pemberian MP-ASI berbahan pangan lokal. Beliau menyatakan, "Jika memang terindikasi stunting harus dilakukan validasi ulang terkait BB/TB balita agar tidak ada kekeliruan data atau hasil status gizinya." Basis pelaksanaan program tetap berbasis data yang didukung regulasi dan kebijakan sesuai strategi nasional, dengan mengintegrasikan lintas program seperti promosi kesehatan (promkes), KIA, kesling, ausrem, surveilans, dan imunisasi.

Koordinasi lintas program di tingkat puskesmas juga dilakukan melalui lokakarya mini bulanan dan pelaksanaan Integrasi Layanan Primer. Kepala dan Pengelola Gizi Puskesmas menyebutkan, "Melalui kegiatan lokakarya mini bulanan di puskesmas, sharing hasil penimbangan di tiap posyandu berbagai desa, menunjukan hasil status gizi berupa BB/u TB/U atau BB/TB beserta by name by address-nya." Seluruh tahapan respons prevalensi

stunting telah dilaksanakan, termasuk memvalidasi ulang kasus stunting, merujuk balita ke puskesmas, atau bahkan ke rumah sakit. Namun, hambatan tetap muncul, terutama dari kurangnya peran serta masyarakat dan adanya balita dengan penyakit penyerta yang enggan dirujuk.

Sebagai strategi masa depan, Kepala dan Pengelola Gizi Puskesmas Majalengka menyarankan pendekatan lintas sektor, lintas program, serta peningkatan peran serta masyarakat melalui edukasi dan konseling kepada remaja putri, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pemantauan perkembangan balita secara rutin juga dianggap penting agar intervensi yang diberikan tepat sasaran dan mampu mencegah kasus baru. Menurut Kepala dan Pengelola Gizi Puskesmas Cikijing, sebelum menetapkan program harus ada data yang berkualitas, termasuk data sebaran kelompok umur, ibu hamil berisiko, remaja, dan balita dengan masalah gizi. Beliau menegaskan, "Setiap program diusahakan dilakukan secara bersama-sama dengan program lain yang terlibat dalam penanganan stunting."

Berdasarkan wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan strategi program percepatan penurunan stunting bergantung pada pemanfaatan data yang akurat, ketersediaan sumber daya, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat. Meski tantangan seperti keterbatasan anggaran dan perubahan perilaku masih menjadi hambatan, integrasi program yang baik diharapkan mampu menurunkan prevalensi stunting secara signifikan. Perlu adanya dukungan berkelanjutan dari semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, puskesmas, hingga masyarakat, agar tujuan nasional percepatan penurunan stunting dapat tercapai.

Tujuan utama dari strategi sumber daya ini adalah untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya penting demi meningkatkan efektivitas kinerja organisasi secara keseluruhan, yang dapat berupa modal finansial, sumber energi, kemajuan teknologi, dan bentuk lainnya. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Tim Kerja Kesga Gizi di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, sumber dana dalam penanganan kasus stunting

bersumber dari DAK Non Fisik Kabupaten dan Puskesmas, Bankeu, APBD, Dana Desa, dan CSR. Selain itu, hasil wawancara dengan Kepala dan Pengelola Gizi Puskesmas Majalengka menyebutkan bahwa sumber dana yang digunakan adalah BOK Non Fisik, DAK Non Fisik (BOK), APBD, dan BLUD. Sementara itu, menurut Kepala dan Pengelola Gizi Puskesmas Cikijing, sumber dana penanganan kasus stunting mencakup BLUD, BOK, Dana Desa, serta pendanaan lainnya di tingkat desa, dengan penekanan bahwa pendanaan untuk penyediaan PKMK berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan dana desa. Penting bagi pemerintah desa untuk memperhatikan keterkaitan anggaran dalam pelaksanaan program-program pencegahan stunting agar pemerintah dapat merinci kebutuhan tenaga kesehatan maupun kebutuhan keluarga penderita stunting, karena strategi pencegahan ini hanya bisa dilaksanakan jika didukung oleh dana yang memadai.

Anggaran menjadi mesin penggerak bagi Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanganan stunting, dan strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka ini dinilai sudah cukup baik dengan adanya kontribusi dari berbagai pihak dalam upaya percepatan penurunan stunting. Berdasarkan hasil beberapa wawancara di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah desa sebagai lembaga yang berwenang untuk memberikan jaminan kesehatan secara merata memiliki sumber daya pendukung yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Dinas Kesehatan.

Strategi kelembagaan merupakan serangkaian rencana atau tindakan yang dirancang oleh suatu institusi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, dengan fokus utama pada peningkatan kapasitas organisasi agar mampu melaksanakan ambisi strategis secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Kerja Kesga Gizi di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus stunting mencakup lintas program di Dinas Kesehatan seperti Promosi

Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, PTM, P2PM, Imunisasi, Pembiayaan Kesehatan, Farmalkes, dan Pelayanan Kesehatan, serta lintas sektor lain seperti DP3AKB, DPMB, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Kemenag, Pengadilan Agama, POLRES, KODIM, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Selain itu, mitra organisasi profesi seperti IDI, PPNI, IBI, DWP, GOW, serta Tim Penggerak PKK juga turut berperan aktif. Dalam wawancara lain dengan Kepala dan Pengelola Gizi Puskesmas Majalengka, mereka menyebutkan bahwa keunggulan Kabupaten Majalengka terletak pada koordinasi lintas sektor yang sudah berjalan dengan baik serta gerak cepat dalam menangani penurunan angka stunting. Sementara itu, menurut Kepala dan Pengelola Gizi Puskesmas Cikijing, kekuatan utama Majalengka adalah kemampuan dalam proses perencanaan dan penggerakan sasaran, serta responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dalam menghadapi masalah stunting.

Untuk mencapai target indikator percepatan penurunan stunting di tingkat daerah, diperlukan perencanaan intervensi pencegahan dan penanganan yang terintegrasi, melibatkan tenaga kesehatan seperti bidan, ahli gizi, kesehatan lingkungan, serta promosi kesehatan yang bekerja sama dengan lintas sektor. Dalam pelaksanaannya, peran tenaga kesehatan dan pihak lintas sektor adalah menyusun manajemen perencanaan dan membuat program-program pencegahan maupun penanganan stunting, dengan fokus pada prioritas masalah yang muncul di wilayah kerja secara sinergis, baik antarpemegang program di lingkup kesehatan (lintas program) maupun dengan lintas sektor lainnya (UPTD Puskesmas Cikijing, 2022). Berdasarkan rangkaian wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi kelembagaan dalam upaya percepatan penurunan stunting dilakukan melalui kerja sama lintas program seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Kemenag, Pengadilan Agama, POLRES, KODIM, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, mitra organisasi profesi, serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Pembahasan

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, penerapan strategi organisasi dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Majalengka terbukti memiliki peran penting dalam menurunkan angka kasus stunting. Strategi organisasi ini berfungsi sebagai solusi jangka panjang dari pemerintah, yang mencakup pemahaman terhadap konsep serta perancangan kegiatan yang diselaraskan dengan visi, misi, dan tujuan program pencegahan stunting. Implementasinya berpijak pada visi Pemerintah Kabupaten Majalengka, yaitu “Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan, dan Bernafaskan Keagamaan”. Strategi organisasi mencakup perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, serta inisiatif-inisiatif strategis baru. Batasan yang diperlukan mencakup pemahaman tentang apa yang harus dilakukan dan siapa yang menjadi targetnya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif (Meilasari & Wiku Adisasmito, 2024).

Strategi organisasi yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dalam menekan angka stunting sudah cukup baik dan terukur yang terlihat dari kegiatan lintas sektor yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) serta optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat, sehingga angka stunting mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Visi Dinas Kesehatan sendiri adalah “Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Sehat Menuju Enrekang Maju.”

Berdasarkan dua kesimpulan peneliti tersebut, terlihat bahwa visi yang telah dirumuskan menjadi komitmen utama dalam merancang dan menjalankan program-program, sekaligus menjadi dasar berpikir dalam menentukan arah kebijakan ke depan. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lingkup lokasi penelitian, di mana penelitian terdahulu hanya mencakup skala lokal di tingkat pemerintah desa, sedangkan penelitian terbaru ini mencakup tingkat pemerintah kabupaten, sehingga skala koordinasi yang terjadi pun berbeda.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, strategi program yang dijalankan

pemerintah bersama tenaga kesehatan dalam mencegah dan menangani stunting telah dirancang dengan perencanaan yang baik dan sistematis agar program berjalan lancar. Dalam penyusunan serta pelaksanaan program tersebut, dana desa seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari setiap desa menjadi salah satu sumber utama pembiayaan. Selain itu, program juga memanfaatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta, jika tersedia, bantuan dari tingkat provinsi. Pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting di desa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah, tergantung kondisi anggaran desa, termasuk dukungan dana dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah desa memegang peran penting dalam memastikan keterkaitan anggaran saat menjalankan program pencegahan stunting, karena hal ini memungkinkan perincian kebutuhan tenaga kesehatan maupun keluarga penderita stunting agar pelaksanaan program berjalan maksimal. Kegiatan seperti Gerakan Masyarakat Peduli Stunting hanya dapat berlangsung dengan baik berkat kontribusi dari pemerintah desa dan Puskesmas. Gerakan ini membawa harapan besar dalam meningkatkan status gizi masyarakat, sehingga penyebaran kasus stunting bisa ditekan. Program seperti makan telur, pemberian makanan sehat kepada ibu hamil, dan pemenuhan gizi untuk balita terbukti efektif meningkatkan status gizi masyarakat setempat.

Pemantauan pertumbuhan anak sudah berjalan baik, begitu juga penyuluhan atau konseling terkait gizi dan stunting pada balita meskipun dinilai kurang aktif tetapi sudah berhasil meningkatkan pemahaman ibu mengenai pola asuh balita stunting (Sukriyani & Jafriati, 2024).

Capaian pemberian makanan tambahan (PMT) dinilai belum optimal karena distribusi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan ke Puskesmas memerlukan waktu lama, sehingga bantuan tidak tersalurkan rutin ke balita stunting. Dari dua penelitian ini, peneliti menemukan kesamaan, yaitu

perencanaan program dinilai sudah baik, tetapi penelitian terdahulu menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan sehingga beberapa program kurang efektif, misalnya terkait distribusi PMT. Sementara itu, penelitian terbaru menunjukkan keunggulan berupa pelaksanaan program yang berjalan efektif, terbukti dari penurunan angka balita stunting tahun 2022–2023, meskipun masih terdapat kekurangan, yaitu keterbatasan tenaga kesehatan profesional di tingkat desa.

Penelitian ini berfokus secara spesifik pada evaluasi strategi pencegahan stunting yang diterapkan pemerintah, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami efektivitas percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Majalengka. Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah, tenaga kesehatan, dan pusat telah bekerja sama dengan baik. Namun, peneliti juga menangkap persepsi bahwa kualitas sumber daya, baik alat kesehatan maupun SDM, masih perlu ditingkatkan. Meski pemerintah telah melakukan banyak strategi untuk meminimalisir kasus stunting secara masif, tanpa dukungan sumber daya yang memadai, upaya tersebut akan mengalami hambatan dalam implementasinya (Moh. Sukran, 2023).

Secara umum, upaya pencegahan stunting di Kabupaten Majalengka merupakan bagian dari strategi nasional. Tujuan-tujuan nasional, termasuk percepatan penanganan stunting, diuraikan dan diterapkan bersama oleh pemerintah daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pemerintah menyusun rencana kerja yang sejalan dengan tujuan nasional, termasuk merancang anggaran, program strategis di tingkat desa, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi program (Yunita Paskalia, Aek, Cicilia Tungga, 2023).

Dalam penyusunan rencana kerja, Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai musyawarah, khususnya terkait isu stunting yang melibatkan tenaga kesehatan, bidan desa, pegawai puskesmas, kader kesehatan desa, PKK, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan masyarakat yang dinilai

mampu menjadi mitra pemerintah dalam mensosialisasikan isu stunting.

Mendukung rencana kerja pemerintah, pihak kecamatan, kabupaten, dan Tenaga Ahli Pendamping Desa juga turut bekerja sama dalam memfasilitasi, memberikan masukan, arahan, serta melakukan evaluasi dari awal perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi program (Kim et al., 2020). Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka sangat serius dalam menangani isu stunting, seperti terlihat dari berbagai bentuk kerja sama pemerintah dan masyarakat, termasuk sosialisasi rutin yang dihadiri tenaga profesional untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, program inovatif seperti kelas ibu hamil, pemberian makanan tambahan (tempe, satu rak telur per bulan untuk ibu hamil dan balita).

Penyuluhan perilaku hidup sehat, pelatihan pembuatan makanan bergizi lokal, serta program jangka panjang seperti pengadaan sarana prasarana kesehatan, pembangunan/perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih di dusun-dusun, peningkatan irigasi pangan dan pembangunan embung (Meilasari & Wiku Adisasmito, 2024).

Strategi pencegahan stunting di Kabupaten Majalengka dapat dinilai positif berkat koordinasi yang berjalan baik antara pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa (Kukuh Pambudi, Mukti, 2023). Namun, korban stunting masih tetap ada karena masalah ini bersifat dinamis dan dapat muncul kapan saja, sehingga kesadaran masyarakat dan perhatian pemerintah di semua tingkatan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Donggala menunjukkan bahwa intervensi berbasis sanitasi dasar dan akses layanan kesehatan sangat penting (Dwi Danti, 2022). Buruknya pengelolaan sampah dapat meningkatkan risiko stunting, sehingga perbaikan pengelolaan lingkungan menjadi faktor penting dalam mendukung pencegahan stunting (Amalia Mulyani et al., 2024). Asumsi peneliti bahwa pengelolaan air bersih, sanitasi dasar, dan akses layanan kesehatan adalah faktor kunci dalam pencegahan stunting, tetapi penelitian ini juga lebih spesifik dalam menjelaskan strategi yang diterapkan, termasuk

tahap demi tahap serta contoh nyata program yang telah terlaksana, dibandingkan penelitian terdahulu.

Berdasarkan temuan penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, strategi kelembagaan dalam percepatan penurunan stunting diarahkan pada penguatan tata kelola serta koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Dinas Sosial. Walaupun struktur tim ini sudah terbentuk, hasil penelitian mengindikasikan bahwa sinergi antar lembaga masih perlu diperkuat, terutama dalam menyusun perencanaan bersama dan pelaksanaan program yang terintegrasi. Di tingkat desa, strategi kelembagaan lebih diarahkan pada penguatan peran pemerintah desa melalui alokasi anggaran dalam APBDes serta pengarusutamaan isu stunting dalam dokumen RPJMDes. Kehadiran Kader Pembangunan Manusia (KPM) di setiap desa juga menjadi elemen penting yang menjembatani komunikasi antara layanan kesehatan dan pemerintah desa, meskipun pemanfaatan data stunting sebagai dasar perencanaan kegiatan desa masih dinilai belum optimal (Sukriyani & Jafriati, 2024).

Dalam upaya memperkuat kapasitas kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Majalengka rutin menyelenggarakan pelatihan lintas sektor bagi tenaga kesehatan, aparat desa, dan kader posyandu. Strategi ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman di antara pemangku kepentingan bahwa stunting adalah isu multidimensi yang memerlukan penanganan dari berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, akses air bersih, serta ketahanan pangan. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka mulai memanfaatkan sistem informasi seperti e-PPGBM untuk mendukung pemantauan gizi balita, walaupun integrasi data antar dinas masih menjadi tantangan yang harus diatasi.

Strategi kelembagaan juga mencakup kemitraan dengan berbagai pemangku

kepentingan, di mana pemerintah daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi lokal untuk pendampingan teknis dan kajian kebijakan, serta dengan sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mencakup penyediaan makanan tambahan, pembangunan sarana sanitasi, dan penyuluhan gizi bagi Masyarakat (Sukriyani & Jafriati, 2024).

Secara keseluruhan, strategi kelembagaan di Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa percepatan penurunan stunting menuntut kolaborasi yang kuat antar sektor, penguatan kapasitas kelembagaan di setiap tingkatan, serta dukungan data yang akurat dan terintegrasi. Komitmen kepala daerah dan pimpinan OPD menjadi faktor penting untuk memastikan agar strategi berjalan secara konsisten dan berkelanjutan (Wagustina et al., 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan percepatan penurunan stunting sangat bergantung pada kolaborasi antar OPD, pelibatan desa dalam penganggaran kegiatan, serta pemanfaatan data untuk perencanaan berbasis bukti. Penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka pun menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor serta penguatan kelembagaan hingga tingkat desa (Pitriani et al., 2023).

Kesimpulan

Variabel program merupakan variabel paling dominan pada pelaksanaan upaya percepatan penurunan stunting. Khususnya dalam komunikasi dan koordinasi dengan lintas pelayanan dan sektor terkait melalui inovasi “kancil menari” kader cikijing terampil mewujudkan posyandu mandiri, lalu menguatkan koordinasi dan kerjasama multi sektoral, melanjutkan edukasi dan sosialisasi mengenai stunting dan meningkatkan cakupan kunjungan ke posyandu.

Dapat menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kesehatan terkait stunting serta memperkuat kerja sama lintas sektor agar strategi pencegahan lebih efektif diterima masyarakat, sementara Puskesmas diharapkan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan memperkuat program intervensi sensitif dan

spesifik, termasuk aktif memberikan penyuluhan mengenai PHBS, stunting dan gizi kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amalia Mulyani, Fauzan Hidayatullah, Hasya Rahmah, Sugih Sugiharta, Ricardo Cordias, & Noer Apptika Fujilestari. (2024). Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi stunting. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(3), 297–309. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.429>
- Dwi Danti, F. (2022). *Evaluasi strategi menekan laju penderita stunting di Kabupaten Buton Selatan* [Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id>
- Fatris, R. (2021). *Strategi Dinas Kesehatan dalam penanggulangan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue* [Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id>
- Firmansyah, R. S., & Elina, M. (2024). Hubungan antara sanitasi lingkungan dan pola pemberian makan dengan kejadian stunting pada balita. *Journal Of Nursing Practice And Education*, 5(1), 110–116. <https://doi.org/10.34305/jnpe.v5i1.1394>
- Kementerian Kesehatan. (N.D.). *Pedoman dan standar etik penelitian dan pengembangan kesehatan nasional*. Balitbangkes. [https://Repository.Badankebijakan.Kemkes.Go.Id/Id/Eprint/4214/1/Pedoman Dan Standar Etik Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Nasional.Pdf](https://Repository.Badankebijakan.Kemkes.Go.Id/Id/Eprint/4214/1/Pedoman%20Dan%20Standar%20Etik%20Penelitian%20Dan%20Pengembangan%20Kesehatan%20Nasional.Pdf)
- Kementerian Kesehatan. (2022). *Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id>
- Kim, C., Mansoor, G. F., Paya, P. M., Ludin, M. H., Ahrar, M. J., Mashal, M. O., & Todd, C. S. (2020). Multisector nutrition gains amidst evidence scarcity: scoping review of policies, data and interventions to reduce child stunting in Afghanistan. *Health Research Policy And Systems*, 18(1), 65. <https://doi.org/10.1186/s12961-020->

- 00569-x
- Kukuh Pambudi, Mukti, M. K. (2023). Evaluasi program penanggulangan stunting di Kalurahan Pandowoharjo Kabupaten Sleman. *Thejournalish: Social And Government*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/313>
- Meilasari, N., & Wiku Adisasmito. (2024). Upaya percepatan penurunan stunting melalui pemberian makanan tambahan (PMT) pangan lokal : systematic review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (Mppki)*, 7(3), 630–636. <https://doi.org/10.56338/mppki.v7i3.4924>
- Moh. Sukran, A. (2023). *Evaluasi penanggulangan stunting di Desa Uebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una* [Universitas Sintuwu Maroso Poso]. <https://repository.unsimar.ac.id>
- Pitriani, Jamaluddin, Sanjaya, K., & Buchair, N. H. (2023). Gerakan partisipatif dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Desa Rogo Kabupaten Sigi. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 2(1), 40–45. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v2i1.124>
- Sukriyani, & Jafriati, L. H. (2024). Evaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di wilayah kerja Puskesmas Mata Tahun 2023. *Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo (Jakk-Uho)*, 5(1). <https://doi.org/10.37887/Jakk.V5i1.7>
- Unicef Indonesia. (2024). *Evaluasi formatif strategi nasional percepatan penurunan stunting*. Unicef Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/id/Gizi/Laporan/Evaluasi-Formatif-Strategi-Nasional-Percepatan-Penurunan-Stunting>
- Wagustina, S., Arnisam, A., Mulyani, N. S., Hadi, A., & Fitriyaningsih, E. (2024). Penguatan percepatan penurunan stunting melalui pemberdayaan remaja peduli stunting. *Jurnal Pade: Pengabdian & Edukasi*, 6(1), 39. <https://doi.org/10.30867/pade.v6i1.1788>
- Yunita Paskalia, Aek, Cicilia Tungga, N. T. (2023). Analisis strategi penanggulangan stunting terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Kupang. *Journal Of Comprehensive Science*, 2(10), 1662–1673. <https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/528/516>